

BAB 1

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat pasti melakukan konsumsi yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari, sehingga sering muncul masalah perekonomian yang dapat menghambat kegiatan masyarakat. Berbagai macam kebutuhan yang terus menerus meningkat tetapi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut sangatlah terbatas mengingat kemampuan dan kebutuhan manusia tidak dapat berjalan dengan seimbang. Setiap kebutuhan yang diperlukan manusia haruslah terpenuhi untuk menunjang kehidupan sehari-hari. (Putri Ari Sandi, Dwiatmanto, Zahroh Z A, 2015)

Kebutuhan merupakan salah satu aspek psikologis yang dapat menggerakkan manusia dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang mendasari terciptanya suatu usaha, banyak orang berusaha membuat aktivitas-aktivitas setiap hari mereka lakukan dapat menjadi sebuah usaha yang mampu memberi pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Banyak masyarakat yang merintis usahanya dari bawah yang terhenti ditengah jalan karena kurangnya dana dalam upaya pengembangan usaha mereka. Disinilah peranan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan untuk mengembangkan usaha mereka maupun untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidup mereka. (Reta Nurrima Fatmasari, Topowijono, Devi Farah Azizah, 2015)

Tujuan pembangunan internasional adalah agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan menerapkan asas-asas yang ada pada Pancasila dan UUD 1945 diharapkan kemakmuran dan kesejahteraan disamaratakan tanpa melihat dari status sosial seseorang dan dapat dinikmati setiap warga negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan berbagai cara dimana salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan meningkatkan pembangunan dibidang ekonomi. Maka diharapkan ketiga pelaku perekonomian di Indonesia yaitu : badan usaha milik Negara, badan usaha milik swasta dan koperasi dapat saling bekerja sama untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi setiap masyarakat Indonesia. (Nanang Budiarto, 2005)

Lembaga keuangan sangat berperan dalam kegiatan kredit yang disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam pengembangan usaha maupun untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga keuangan yang ada di Indonesia terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan *non* bank. lembaga keuangan *non* bank mulai banyak bermunculan di berbagai daerah di Indonesia, sama dengan bank umum tugas lembaga keuangan *nonbank* untuk membantu setiap masyarakat yang membutuhkan dana sebagai penyedia dana. Salah satu contoh lembaga keuangan *nonbank* yang berperan serta dalam pembangunan perekonomian di Indonesia adalah koperasi. (Putri Ari Sandi, Dwiatmanto, Zahroh Z A, 2015)

Menurut undang-undang No. 17 tahun 2012 koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi dapat disebut juga sebagai soko guru perekonomian rakyat, oleh sebab itu jika koperasi yang ada di Indonesia dapat maju dan lebih kuat lagi dalam perkembangannya, maka perekonomian rakyat Indonesia khususnya rakyat kecil dapat terangkat dengan sendirinya. Karena dengan lebih kuat dan majunya perkembangan perkoprasian yang ada di Indonesia masyarakat akan lebih dipermudah karena kebutuhan dana yang ada di masyarakat lebih tersedia, dan juga sebagai alternatif jika lembaga keuangan bank tidak dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat. Koperasi juga dapat disebut sebagai penggerak perekonomian rakyat yang ada di Indonesia, khususnya golongan masyarakat kecil atau yang perekonomiannya lemah. (Reta Nurrima Fatmasari, Topowijono, Devi Farah Azizah, 2015)

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang cukup unik karena dimiliki dari satu atau lebih individu yang memiliki visi, misi sama dan didasari dengan jiwa kerja sama untuk tercapainya suatu tujuan tertentu. Perkembangan koperasi pada saat ini semakin pesat dan sudah banyak membantu dalam pengembangan pembangunan perekonomian di Indonesia. Karena sudah semakin banyaknya koperasi yang didirikan di daerah-daerah yang bertujuan melayani kebutuhan setiap anggota dan

masyarakat sekitar yang tergabung didalamnya. Dahulu koperasi hanya menekankan kegiatannya pada simpan pinjam dan seiring berjalannya waktu mulai terjadi perkembangan yang cukup baik bagi koperasi yang mana dalam tahapan ini kegiatan koperasi tidak hanya berputar pada simpan pinjam namun sudah berkembang menjadi koperasi serba usaha yang juga menyediakan barang-barang konsumsi. (Riska Anggraeni Amaliyanti, jurnal)

Selain itu, koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada serta dapat mensejahterakan setiap anggota khususnya dan masyarakat sekitar yang diharapkan juga dapat terkenadampaknya. Hal ini dapat dijadikan salah satu jawaban dalam menangani keresahan yang terjadi dimasyarakat mengenai kondisi ekonomi mereka. Sebab keberadaan koperasi bertujuan membantu dalam peningkatan kesejahteraan setiap masyarakat terutama para anggota yang menjadi bagian dari koperasi tersebut dan juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang ada disekitar koperasi yang membutuhkan bantuan keuangan. (Fitri Khaula Hatsari, Moch. Dzulkirom AR, Muhammad Saifi, 2014)

Didalam melaksanakan kegiatannya, dalam pengambilan setiap kebijakan yang ada pada koperasi dilakukan dengan cara yang demokratis demi kepentingan untuk tercapainya setiap tujuan dan keinginan bersama. Pengelolaan koperasi yang professional adalah kemampuan pengurus menjadi dasar pengelolaan yang baik atau manajemen koperasi untuk menjalankan koperasi harus mengikuti setiap kebijakan-

kebijakan yang dibuat dan di sepakati bersama. Karenanya setiap aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh koperasi diperlukan adanya suatu pusat pertanggungjawaban yang berguna untuk mengevaluasi dan mengawasi kinerja demi tercapainya hasil yang maksimal berdasarkan pada kesepakatan atau tujuan umum yang telah ditetapkan sebelumnya. (Riska Anggraeni Amaliyanti, jurnal)

Koperasi Serba Usaha Madani merupakan salah satu lembaga keuangan yang diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan setiap anggota serta masyarakat umum di sekitarnya. Sebagai salah satu upaya dalam memperbaiki kondisi ekonomi demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota. Salah satu upaya yang diberikan KSU Madani dalam rangka peningkatan kesejahteraan setiap anggota yang ada serta masyarakat yang ada disekitarnya, yaitu dengan memberikan kredit yang diharapkan dapat menambah modal usaha para anggota yang mengalami kesulitan pada pendanaan untuk modal usaha yang mereka butuhkan. (Nanang Budianto, 2005)

Kredit yang diberikan KSU Madani diharapkan dapat bermanfaat bagi anggota yang perekonomiannya dalam kategori ekonomi lemah sebagai salah satu modal dalam pengembangan usaha dan untuk kebutuhan sehari-hari setiap anggota sehingga tercipta peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya, keadaan ekonomi seperti itulah yang harus dimengerti dan diterapkan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Suatu kenyataan bahwa penduduk di Indonesia banyak yang masih tinggal di pedesaan, oleh karena itu pembangunan perekonomian harus mulai diarahkan ke pedesaan guna membangun dan

mengembangkan potensi-potensi usaha yang ada di pedesaan untuk pertumbuhan perekonomian secara terpadu dan berkesinambungan. (Nanang Budianto, 2005)

Dari setiap kredit yang disalurkan pasti memiliki resiko yang tidak dapat dihindari oleh pihak koperasi yaitu adanya kredit bermasalah yang biasa disebut dengan kredit macet atas kredit yang sudah diberikan, yang dapat berbahaya bagi kelangsungan hidup koperasi tersebut. Bahaya yang timbul dari adanya kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang sudah disalurkan kepada anggota tidak terbayar, baik yang sebagian maupun seluruhnya. Oleh sebab itu setiap melakukan pemberian kredit diperlukan adanya perhatian khusus agar terjadinya kredit macet dapat dihindari. Dengan adanya sistem pengendalian manajemen kredit dapat terlihat baik dan buruknya kredit yang diberikan kepada anggota yang mengacu pada teori tersebut. (Putri Ari Sandi, Dwiatmanto, Zahroh Z A, 2015)

Pengendalian manajemen kredit menurut Hasibuan (2006:105) adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Tujuan adanya sistem pengendalian kredit agar terhindar dari terjadinya wewenang dari berbagai pihak yang bersangkutan dan terhindar dari praktek pemberian kredit yang tidak sehat, sehingga dapat meminimalkan resiko terjadinya kredit macet dan tidak melebihi standard tingkat kesehatan koperasi. Apabila permasalahan kredit tersebut dibiarkan dan tidak ditangani dengan serius pencegahannya, maka kinerja operasionalnya akan terkenadampaknya buruknya. Oleh sebab itu sistem pengendalian manajemen kredit sangat diperlukan yang

tujuannya untuk meminimalisir terjadinya resiko kredit macet yang terjadi pada KSU Madani.(Putri Ari Sandi, Dwiatmanto, Zahroh Z A, 2015)

Pemberian kredit pada KSU Madani Lumajang mengalami kendala yakni adanya kredit yang tidak terbayar atau yang sering didengar dengan istilah kredit macet. Dari hasil penelitian pemberian kredit yang disalurkan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun dengan penyaluran kredit yang diberikan mengalami peningkatan, maka juga akan mengakibatkan penunggakan pembayaran atau kredit macet juga meningkat hal ini akan dapat mengakibatkan kerugian bagi koperasi jika kredit yang diberikan tidak dapat dikembalikan. Banyaknya kejadian-kejadian yang mengakibatkan kredit tidak terbayar atau kredit macet terjadi akibat persetujuan kredit yang diberikan tidak begitu ketat dan kurangnya ketelitian dalam menganalisis kredit. KSU Madani Lumajang harus lebih selektif dalam menilai kelayakan kredit yang diajukan anggota, karena pada dasarnya tahap pemberian kredit tidak hanya sampai kredit dicairkan tetapi sampai kredit yang diberikan dapat dibayar lunas oleh anggota. Peranan pengendalian manajemen kredit sangat diperlukan agar dapat meminimalisir resiko terjadinya kredit tak terbayar atau kredit macet.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka saya rasa perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai **Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Manajemen Kredit** (studi pada Koperasi Serba Usaha Madani lumajang)

1.2 Batasan Masalah

Agar permasalahan tersebut tidak terlalu luas, maka dalam penelitian ini dibatasi hanya pada Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Manajemen Kredit

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana sistem dan prosedur pemberian kredit yang diterapkan pada KSU Madani Lumajang dalam upaya mendukung pengendalian manajemen kredit.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis sistem dan prosedur pemberian kredit yang diterapkan pada KSU Madani Lumajang dalam upaya mendukung pengendalian manajemen kredit.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Sebagai gambaran umum bagi masyarakat mengenai sistem dan prosedur pemberian kredit yang diterapkan pada KSU Madani.
2. Bagi pihak koperasi diharapkan mampu memberikan manfaat tentang sistem dan prosedur pemberian kredit yang diterapkan untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah melalui pengendalian manajemen kredit yang baik.

3. Bagi peneliti sebagai latihan teknis untuk membandingkan ilmu yang sudah didapat dan dipelajari dibangku kuliah dengan pelaksanaan yang sebenarnya.

